

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, sehingga harus memiliki kemampuan dalam mengatur dan merencanakan dengan baik anggaran belanja. Upaya ini dilakukan sebagai upaya memaksimalkan potensi yang ada dalam melakukan pelayanan masyarakat (Sophian & Rezi, 2022). Penyerapan anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan dari kinerja suatu instansi pemerintahan (Hindriani et al., 2020).

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, agar suatu anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan. Menurut Setiawan (2021) pengelolaan penyusunan anggaran daerah, hendaknya mengutamakan kepentingan publik dan sistem pengendalian intern pemerintah harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan sebuah instansi pemerintahan untuk membantu mencapai tujuan organisasinya (Hindriani et al., 2020).

Untuk mencapai ketepatan realisasi Belanja Dinas, Bidang Keuangan harus mempunyai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1:

“ Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ”

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak (Hindrian, 2012). Sistem pengendalian intern pemerintah mengadopsi dari konsep pengendalian internal yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi (Hindrian, 2012)

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan SPIP secara efektif, efisien dan terarah adalah dengan menyusun suatu rencana kerja atau desain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Costa, 2023). Penerapan SPIP dengan baik maka pengelolaan dan pengawasan anggaran keuangan daerah dapat berjalan baik serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan juga efisien dalam mendukung terciptanya *good governance* (Damayanti, 2020). Desain penyelenggaraan SPIP berisi rencana pelaksanaan seluruh unsur SPIP, yang mencakup unsur-unsur; (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (d) pemantauan pengendalian intern dalam kurun waktu satu tahun (Maghfiroh, & Ramadhanti, 2022). Dalam sistem penganggaran, setiap pengeluaran anggaran harus memiliki acuan dan kerangka yang jelas, selanjutnya proses perencanaan dan penganggaran daerah membutuhkan sistem pengendalian agar perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Ahmad, 2020)

Penelitian ini mengambil objek di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang merupakan suatu lembaga pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Blitar dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan tenaga kerja. Masalah yang sering terjadi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar ini berkaitan dengan pengendalian internal sistem pengeluaran kas pada setiap penganggaran yang dilakukan tiap bulannya sering tidak sesuai dengan rincian kas (RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)) yang sudah ditetapkan diawal penganggaran setiap tahunnya. Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan data perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2023 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat**  
**Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pendapatan			
Belanja			
Belanja Operasi	7.872.177.000	11.527.933.320	3.655.816.320
Belanja Pegawai	3.270.430.000	3.266.191.320	(4.238.680)
Belanja barang dan Jasa	4.601.747.000	8.261.802.000	3.660.055.000
Belanja Modal	0	35.200.000	35.200.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	35.200.000	35.200.000
Jumlah belanja	7.872.177.000	11.563.193.320	3.691.016.320
Total Surplus/ (Defisit)	(7.872.177.000)	(11.563.193.320)	(3.691.016.320)

Sumber: Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Blitar Tahun anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 3.691.016.320,-. Perubahan anggaran merupakan suatu perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan

program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu berfungsi untuk *mereview* hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun bejilalan dan tahun berikutnya. Penyebab utama defisit anggaran terjadi adalah karena perencanaan alokasi APBD dinilai masih masih lemah. Contohnya pada pos belanja khususnya pengadaan barang jasa dan belanja pegawai yang masih terlalu tinggi.

Kondisi ini menjadikan dinas sulit untuk mencairkan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran, penggunaan biaya yang tidak rill, misalkan seperti pegawai yang mendapat perintah tugas luar (perjalanan dinas) yang tidak melakukan perjalanan namun menerima pencairan dana anggaran perjalanan dinas tersebut, sehingga dalam permasalahan ini dibutukannya pengendalian internal yang memadai.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tercipta perumusan masalah yaitu: Bagaimana sistem pengendalian internal realisasi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian internal realisasi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai wadah untuk menerapkan teori, serta meningkan suatu pengetahuan mengenai sistem pengalihan internal anggaran belanja pada instansi sehingga dapat membandingkan teori terhadap prosedur dan pelaksanaan di lapangan.

##### 2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi dinas sebagai acuan dan pertimbangan dalam mengendalikan internal anggan belanja. Sehingga sistem pengendalian internal pada instansi dapat lebih efisien dan efektif menjadi lebih meningkat lebih baik lagi.

